

program; (2) melakukan pelatihan; (3) sosialisasi publik dan (4) melakukan perbaikan terhadap kebijakan. Keberhasilan program MA Amanatul Ummah didukung sistem perekrutan siswa yang ketat untuk masuk dikelas akselerasi. Didukung pola SQ (*spiritual question*) melalui shalat tahajud dan penguatan nilai-nilai *salafus shaleh* sebagai model pengembangan karakter dan motivasi terhadap keberhasilan siswa. Munculnya pola *building image* melalui program akselerasi sebagai *brand* lembaga, yang diperankan oleh kiai sebagai *public figure*. Sedangkan di MAN *brand* madrasah sebagai lembaga negeri lebih kuat namun kurang ada penguatan terhadap program akselerasi. Kurangnya keberanian lembaga negeri untuk lepas dari ketentuan-ketentuan baku yang terlalu sentralistik.

3. Evaluasi kebijakan program akselerasi di MA Amanatul Ummah dan MAN Mojosari dilakukan melalui pihak eksternal dan internal. menggunakan evaluasi dengan tipe valuasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) dengan tipe evaluasi proses (*proses of public policy implementation*). Peran pihak eksternal merupakan bagian dari garis vertikal organisatoris yaitu Kementerian Agama Tingkat Pusat, Wilayah dan Kabupaten yang memiliki tugas untuk mengawasi program. Sedangkan pihak internal yaitu yayasan, kepala madrasah dan koordinator yang langsung melakukan evaluasi di lapangan.

B. Implikasi Teoritik

Dari hasil dari pengumpulan data dan analisis serta pembahasan, maka penelitian ini menemukan beberapa teori berdasarkan pada substansi masalah yang diangkat. Ada dua tipologi lembaga pendidikan Islam, yaitu madrasah yang memiliki ketaatan dengan seluruh kebijakan pemerintah yang diwakili madrasah negeri dan madrasah yang memiliki fleksibilitas terhadap kebijakan pemerintah, yang diwakili oleh madrasah swasta.

Penelitian ini memperoleh temuan. Pertama, dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah, lembaga pendidikan Islam membutuhkan tahapan-tahapan, dimana tahapan tersebut sebagai langkah menyikapi dan menerima *policy* yang diawali dengan sebuah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Temuan ini menguatkan teori perencanaan kebijakan yang dikemukakan oleh W. Dunn dan Yeremias di mana sebuah perencanaan kebijakan membutuhkan tiga langkah yaitu; menyepakati kriteria alternatif, kemudian penentuan alternatif yang terbaik dengan tujuan agar semua manfaat dan kerugian serta kesulitan dan dampak negatif dan positif dapat terungkap, kemudian pengusulan alternatif terbaik.

Kedua, implementasi kebijakan program akselerasi di lembaga pendidikan Islam terutama madrasah berbasis pesantren akan terlaksana dengan baik, jika terdapat implementor yang memiliki multiperan sebagai publik figur (kiai). Peran publik figur menjadi penerus yang mampu menjadi mediator secara

vertical-horizontal. Temuan ini mengafirmasi pendapat Nur Syam bahwa peran kiai memiliki fungsi sebagai mediator yaitu menghubungkan antara kepentingan berbagai segmen (golongan) terutama kelompok elit dengan masyarakat. Temuan ini juga mengafirmasi pendapat Cultip yang mengatakan bahwa reputasi publik terhadap organisasi pada dasarnya banyak berasal dari perilaku pejabat senior pada saat mereka di posisi puncak. Ketika kiai bertindak dan berbicara maka akan berlangsung interpretasi dan gema yang diciptakan oleh figur tersebut.

Ketiga, kebijakan program akselerasi mampu dijadikan sebagai program unggulan di madrasah. Kehadiran program akselerasi sangat tepat untuk membangun *image* madrasah yang dianggap sebagai “second class”. Selain itu program unggulan yang akan diterapkan harus dibarengi dengan penguatan *leadership*. Temuan ini menguatkan pendapat Muhaimin untuk melakukan program unggulan madrasah harus mampu membangun citra (*image building*), membangun program-program unggulan dan memperkuat *leadership*. Temuan ini menguatkan teori Frank Jefkins tentang citra bayangan, bahwa citra yang melekat pada orang dalam sebuah organisasi biasanya melalui pemimpinnya, yaitu anggapan pihak luar terhadap organisasinya. Selain itu citra juga bisa dibangun melalui persepsi positif.

Keempat, Lembaga pendidikan Islam swasta mempunyai langkah yang lebih maju dan berani untuk melakukan lompatan melampaui lembaga negeri. Lembaga swasta mampu melakukan networking dengan lembaga pemerintah atau swasta tanpa terikat oleh ketentuan-ketentuan dari pemerintah.

Kelima, ritual shalat malam (shalat tahajud) mampu memberikan motivasi dan dorongan serta menurunkan ketegangan dan stress pada siswa. Sehingga mampu mendorong prestasi siswa dalam belajar. Temuan ini senada dengan hasil penelitian Sholeh (2012) bahwa dengan melakukan tahajud siswa bisa menjadi lebih tenang dan tidak stress sehingga mendorong siswa lebih tenang dalam belajar.

Dari proposisi dan temuan di atas, menghantarkan peneliti untuk merekomendasikan hasil penelitian bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama perlu mempertahankan kebijakan program akselerasi, sehingga siswa yang berkemampuan istimewa dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun harus dibarengi dengan kesungguhan dan pembiayaan yang memadai dari pemerintah.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini dilakukan dalam *setting* dan kancah yang terbatas. Sifat penelitian adalah kasuistik, sehingga tidak bisa digeneralisasikan dengan diberlakukan pada semua kancah penelitian. Dari sisi lokasi penelitian, dilakukan pada dua madrasah yaitu madrasah negeri dan swasta, tentunya belum bisa mewakili seluruh lembaga pendidikan Islam. Sedangkan dari sisi fokus penelitian masih sebatas pada rana implementasi kebijakan program akselerasi. Peneliti menyadari akan keterbatasan, oleh karenanya belum menyentuh pada aspek politik, ekonomi secara mendalam. Harapan peneliti untuk penelitian selanjutnya

